

**POLITIK ANGGARAN ALOKASI DANA DESA BUKIT PAMEWA
KECAMATAN SIPORA UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

OLEH :

**REN YANI, S.STP
1420832004**



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Aidinil Zetra, MA**
- 2. Dr. Asrinaldi, M.Si**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

ABSTRAK

Nama : **Ren Yani, S.STP**
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Judul : Politik Anggaran Alokasi dana Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

(Dibawah bimbingan Dr. Aidinil Zetra, MA dan Dr. Asrinaldi, M.Si)

Dari sekian banyak persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pusat hingga daerah bahkan desa adalah bagaimana membangun mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam menciptakan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan itu, sudah semestinya pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji, yakni posisi elit penentu dalam proses penganggaran yang mampu memainkan perannya untuk memanipulasi proses tersebut dengan hasil akhir adalah memenuhi kepentingan elit dan golongannya. Sementara posisi masyarakat sendiri, lemah dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh elit/pejabat publik. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Mentawai, tepatnya di Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara. Analisa yang didapatkan yakni telah terjadi penyalahgunaan kewenangan pada proses penggunaan anggaran oleh pejabat publik, untuk kepentingan pribadi dan mengenyampingkan tujuan awalnya. Anggaran desa belum di alokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, namun hanya memenuhi keinginan dari beberapa elit penguasa yang ada di desa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Kepala Desa merupakan seorang aktor yang memiliki kekuasaan penuh atas kewenangannya dalam merumuskan kebijakan serta penentu individu-individu mana yang dipakainya dalam memenuhi posisi jabatan dalam system perangkat desa, dengan tujuan agar perumusan kebijakan anggaran dalam penyusunan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kepala Desa. Selain itu, indikasi adanya politik dalam penganggaran tersebut juga dapat ditelusuri melalui derajat transparansi anggaran. Pemerintah Desa sebagai penyusun dan pengelola anggaran desa tidak pernah mengikutsertakan masyarakat kedalam segala aktifitas perencanaan kebijakan anggaran hingga pengelolaan maupun pertanggungjawaban anggaran Desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Studi Kasus. Pengumpulan data untuk memperoleh data melalui wawancara, dan bahan pendukung lainnya menggunakan beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara bersama 7 orang informan sebagai nara sumber. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumentasi dan observasi.

Kata Kunci : Politik Anggaran, Elit

ABSTRACT

Name : Ren Yani, S.STP
Study Program : Master of Political Science
Title : Budget Politics Budget allocation of Bukit Pamewa
Village, North Sipora District, Mentawai Islands District

(Under Supervised by Dr. Aidinil Zetra, MA and Dr. Asrinaldi, M.Si)

Of the many fundamental issues in the process of governance, both at the central to even the village level is how to build a government mechanism that can carry out its mission in realizing a prosperous and just society. In creating and realizing a prosperous and just society, the government should implement development based on the aspirations of the community, and provide public services as well as possible. The essence of the existence of government and bureaucracy is in order to carry out the task of providing the best service to the community. Governance is not held to serve itself, but to serve the community and create conditions that enable every member of society to develop its ability and creativity in order to achieve common progress.

One interesting case to examine, the position of the decisive elit in the budgeting process that is capable of playing its role to manipulate the process with the end result is to satisfy the interests of the elit and its faction. While the position of the community itself, weak in the supervision of the use of the budget by the elit / public officials. This research is located in Mentawai Regency, precisely in Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara. The analysis obtained that there has been abuse of authority on the process of using the budget by public officials, for personal gain and put aside the original purpose. Village budgets have not been fully allocated for the welfare of society in general, but only fulfill the wishes of some ruling elit in the village.

From the result of the research, it can be concluded that the Village Head is an actor who has full authority over his authority in formulating the policy and determining which individuals he uses to fulfill his position in the village apparatus system, with the aim that the formulation of budget policy in the preparation of the budget in accordance with what the village chief wants. In addition, indications of politics in budgeting can also be traced through the degree of budget transparency. The village government as the village budget compiler and manager never involves the community into any budget planning policy activities up to the management and accountability of the village budget.

This research used qualitative method with Case Study technique. Data collection to obtain data through interviews, and other supporting materials using multiple sources both primary and secondary. Primary data collection using interview technique with 7 informant as resource person. Secondary data collection using literature study, documentation study and observation.

Keywords: Budget Politics